



# **SEMINAR KEPIMPINAN ISLAM SERANTAU**

*Seminar on Regional Muslim Leadership*

**Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya**

## **Masa Depan Kepimpinan Islam di Indonesia**

*The Future of Muslim Leadership in Indonesia*

**H.A. Malik Fadjar**

Menteri Agama Indonesia

*Minister of Religion, Republic of Indonesia*

29 Safar & 1 Rabi' al-Awwal 1420

14 & 15 Jun 1999

Dewan Kuliah Utama  
Akademi Pengajian Islam  
**Universiti Malaya**



*tradisi kecemerlangan*



## MASA DEPAN KEPEMIMPINAN ISLAM DI INDONESIA

### Landasan Pemikiran

Setidaknya karena alasan kuantitatif, pembicaraan tentang masa depan kepemimpinan Islam di Indonesia untuk sebagian mungkin bisa merepresentasikan harapan kaum Muslimin secara umum. Sebab, dari segi jumlah penganut, umat Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, meski secara kualitatif bisa dikatakan masih menderita berbagai kelemahan, sedikitnya bila dilihat dari jumlah dan mutu penerbitan yang dihasilkan. Harapan ini diperkuat oleh fenomena keagamaan yang cukup semarak dalam duapuluh tahun terakhir, berbarengan dengan tuntasnya persoalan ideologis lewat penerimaan asas tunggal Pancasila. Sehingga, depolitisasi Islam ini melahirkan "hikmah terselubung", yakni munculnya paradigma baru keagamaan dan mulusnya proses santrinisasi di kalangan borikrasi.

Akan tetapi, sebagai bagian dari negara dunia ketiga, Indonesia — seperti juga sebagian terbesar dunia Islam lainnya— sampai hari ini masih menghadapi berbagai problem yang akut seperti kemiskinan, keterbelakangan, dan kelemahan sumberdaya manusia. Sehingga berbagai usaha untuk melakukan sosialisasi keilmuan dalam bidang sosial-keagamaan dan pengenalan lingkungan strategis umat Islam dalam dunia moderen tidak selalu mudah dilakukan. Untuk Indonesia sendiri, kelemahan ini antara lain diakibatkan oleh masih mudanya Islam menancapkan pengaruhnya di daerah ini, jaraknya yang jauh dengan pusat peradaban Islam di Timur Tengah, hambatan bahasa yang cukup akut, dan sejarah kolonialisme selama lebih dari tiga abad.

Ketika peradaban Islam di Timur Tengah berada pada puncak kekuasaannya, bahkan mendekati masa-masa stagnasi melalui ancaman-ancaman penutupan pintu *ijtibad*, di Nusantara belum terdapat suatu komunitas Muslim pun, kecuali secara individual yang jumlahnya bisa dihitung. Pada saat kaum Muslimin dari berbagai pelosok dengan relatif mudah menjangkau Saudi Arabia dan Mesir —dua kota pusat peradaban Islam ketika itu— untuk melaksanakan ibadah haji dan melakukan studi, kaum Muslimin di kawasan

Indonesia dan sekitarnya masih belum memiliki teknologi pelayaran yang aman dan memadai untuk bisa menjangkau wilayah itu. Sehingga perjalanan ke pusat peradaban Islam di Timur Tengah hampir sama dengan menjemput maut, sehingga untuk melepaskannya perlu dilakukan prosesi yang kurang-lebih sama dengan upacara kematian: ada isak tangis yang histeris, kumandang adzan yang menyayat hati, doa-doa panjang yang mengingatkan alam kubur, dan *hajatan* yang melibatkan seluruh masyarakat sekitar. Selain itu, ketika hampir seluruh karya-karya ilmiah dan keagamaan ditulis dalam bahasa Arab (dan Persi), wilayah Nusantara tidak bisa memahaminya karena memiliki tradisi kebahasaan yang jauh berbeda seperti Jawa, Sunda, Aceh dan lain-lain -- meski kemudian bahasa ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pembentukan bahasa Indonesia.

Antara lain karena alasan itu, para pengamat lebih sering mengabaikan arti penting kawasan yang oleh Richard Bulliet disebut sebagai "Dunia Penghujung" (*Islam from the edge*). Terminologi yang terkesan mengabaikan arti penting kawasan ini juga diberikan oleh von Grunebaum dan William Roff yang masing-masing menyebutnya dengan istilah "tradisi kecil" (*little tradition*) dengan praktik keagamaan yang sudah tidak lagi murni, dan "Islam yang dikaburkan" (*Islam obscured*) karena pengaruh ajarannya yang minimal di Nusantara dan sekitarnya. Bahwa belakangan Islam di kawasan ini mulai ditengok dan dipertimbangkan peran kultural dan politiknya, sepenuhnya merupakan fenomena yang menggembirakan. Gejala ini bisa kita fahami secara optimistik bahwa Islam di Nusantara dan kawasan Asia Tenggara lainnya *insya Allah* memiliki masa depan yang cerah, meski dengan sejarah masa lalu yang kurang bisa dibanggakan. Dalam konteks inilah kita melihat masa depan Islam di Asia Tenggara bisa menjadi pusat peradaban Islam yang sejajar dengan peradaban Islam lain, yakni Arab, Persia, dan Turki Utsmani.

Optimisme ini didasarkan atas adanya kenyataan bahwa kaum Muslimin di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kesamaan kultural dan historis --yakni sama-sama berada pada satu rumpun budaya Melayu dan menganut paham Sunni (*Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah*), dan kehadirannya yang berlangsung secara damai --kini tengah menata berbagai struktur kelembagaannya secara signifikan. Dari kawasan ini kini suatu angkatan baru telah muncul dengan membawa angin segar bagi kebangkitan kembali peradaban Islam yang siap menyongsong berbagai tantangan sosial dan kultural yang kian mengglobal. Di masa-masa mendatang, kesamaan kultural yang dimilikinya akan menjadi kekuatan potensial bagi terbentuknya visi



keagamaan yang lebih mengakar dan kontekstual dalam menyambut ufuk baru peradaban Muslim. Tambahan pula, kedekatan wilayah dan kesamaan kultural ini bisa menjadi kekuatan yang dahsyat untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai pusat peradaban Islam yang paling penting di masa depan.

Bagi kaum Muslimin Indonesia sendiri, berbagai kesamaan kultural Muslim Asia Tenggara ini bisa menjadi potensi yang baik untuk lebih mempererat kerjasama dalam bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keilmuan, keagamaan, dan kebudayaan; sehingga masing-masing bangsa serumpun ini bisa saling belajar dan menimba ilmu, termasuk dalam masalah kepemimpinan dan pengembangan kebijakan. Kerjasama seperti ini diharapkan tidak saja mampu membangun kesepahaman antara masing-masing negara, tetapi sekaligus juga bisa menghasilkan suatu definisi situasi yang sama mengenai berbagai persoalan itu.

### **Kepemimpinan: Problem Definisi**

Dalam konteks ini, istilah "kepemimpinan Islam" merupakan salah satu persoalan yang masih belum mendapatkan definisi yang sama. Secara akademis, tampaknya memang tidak mungkin setiap orang mendefinisikan "kepemimpinan Islam" secara sama dan seragam, sesuai dengan keanekaragaman bidang keahlian dan pendekatan yang diambil oleh masing-masing. Ada pemikir yang membangun kategori kepemimpinan di Indonesia menjadi "pemimpin Nasionalis Muslim sekular" dan "pemimpin Nasionalis (Muslim) Islami." Ke dalam kelompok pertama dimasukkan tokoh-tokoh semisal Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, dan lain-lain; sementara untuk kategori kedua dimasukkan orang-orang seperti Mohammad Natsir, Hadji Agus Salim, Hamka, K.H. Wachid Hasjim, dan K.H. Ahmad Dahlan. Kategori ini nampaknya tidak mendefinisikan "pemimpin Islam" sebagai pemimpin masyarakat yang beragama Islam, setidaknya secara nominal. Sehingga kategori "pemimpin Islam" harus memuat unsur-unsur keulamaan, kesalehan ritual, dan adanya ikatan ideologis-politis dengan ajaran Islam. Tetapi bila unsur-unsur ini dimasukkan, maka apa yang disebut sebagai pemimpin Islam akan mengalami pengurangan, baik dari jumlah maupun kualitas. Karenanya dari berbagai segi definisi seperti ini nampak lebih bersifat politis ketimbang akademis.

Sebagai alternatif, kemudian muncul kategori pemimpin Islam lain yang didasarkan atas tiga variabel utama, yakni kepemimpinan Islam

kharismatik-tradisional, kepemimpinan Islam birokrasi, dan kepemimpinan Islam organisasi. Apa yang disebut dengan kepemimpinan Islam kharismatik-tradisional adalah pemimpin Islam yang muncul karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki baik dari segi keilmuan, kesalehan ritual, ketenangan spiritual, dan kedekatan sosial dengan masyarakat sekitar. Pemimpin jenis ini umumnya tidak lahir dari suatu proses pemilihan, melainkan lebih sebagai proses alamiah. Dalam kehidupan sosial di Indonesia, kategori pemimpin kharismatik ini biasanya dianut oleh kalangan masyarakat tradisional. Sementara itu, pemimpin Islam birokrasi adalah pemimpin Muslim yang berasal dari lembaga birokrasi atau pejabat pemerintah. Ke dalam kategori ini masuk tokoh pejabat yang beragama Islam, meski pengetahuan keagamaan yang dikuasainya masih berada pada tingkat minimal. Bahkan juga terlepas dari apakah anutan ideologinya sendiri secara substantif berbeda—mesti tentunya tidak bisa bertentangan—dengan kelompok yang menamakan dirinya “pembela panji Islam.” Sedangkan kepemimpinan Islam organisasi adalah pemimpin yang muncul dari organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang secara kuantitatif memang cukup banyak. Kelompok ini umumnya berada di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan Islam moderen, lembaga-lembaga dakwah, organisasi profesi, serta kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Secara kategoris, pendekatan alternatif ini nampaknya jauh lebih terbuka dan kondusif dengan situasi sosial dan keagamaan di Indonesia, karena memasukkan berbagai unsur dan latar belakang sosial, anutan politik, posisi struktural, dan latar belakang keilmuan. Secara politis kategori ini juga nampak lebih netral karena mampu menampung seluruh komponen keumatan, serta berhasil mendamaikan problem “agama” dan “negara” (atau “Islam” dan Pancasila) dalam sejarah pergulatan politik di Indonesia. Karena itu, “kepemimpinan Islam” dalam makalah ini dilihat dari kerangka ini.

Dalam perkembangannya, seluruh jenis kepemimpinan ini mengalami dinamika internalnya secara signifikan sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Secara perlahan, terjadi perubahan dari pola kepemimpinan yang individual ke kolektif, dari corak ideologis ke rasional-akademis, dan dari komunalisme keumatan yang sempit mengarah pada jangkauan umat secara lebih luas. Belakangan, seiring dengan munculnya partai-partai politik keagamaan, dinamika ini menjadi kian menguat, karena seorang anggota organisasi tertentu, misalnya, tidak selalu mempercayakan aspirasi politiknya pada partai yang didirikan oleh tokoh atau organisasi tersebut.



## Akar Historis Kepemimpinan Islam di Indonesia

Salah satu aspek yang penting untuk menangkap dinamika kepemimpinan Islam di Indonesia adalah kenyataan historis dari relatif barunya Islam menancapkan pengaruhnya di tanah air. Seperti banyak diungkap oleh para sejarawan dan beberapa cendekiawan Muslim di Indonesia, ketika dunia Islam tengah ramai-ramainya melakukan polemik keilmuan dalam bidang filsafat dan teologi yang antara lain melibatkan al-Ghazali dan Ibn Rusyd, di tanah air Kerajaan Kediri tengah berada pada puncak kekuasaannya di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya. Kebaruan ini juga bisa dilihat dari perbandingannya dengan India. Ketika kerajaan Hindu Majapahit mencapai kejayaannya, Anak Benua India justru sudah lama berada dalam pangkuan kekuasaan Islam. Kesultanan Delhi di India, misalnya, sudah berdiri pada 1207; sementara kerajaan Hindu Majapahit di Tanah Air yang cukup terkenal itu baru muncul hampir seabad kemudian (1279). Artinya, India sudah berkenalan dengan Islam jauh sebelum di Indonesia mendapatkan pemeluknya. Karenanya bisa dipahami bila monumen budaya yang paling populer di Indonesia adalah Borobudur, Prambanan dan beberapa candi lainnya (yakni, simbol peradaban Hindu dan Buddha) meski penduduknya sendiri mayoritas memeluk agama Islam.

Akan tetapi, meski dalam usia yang relatif baru, kepemimpinan Islam di Indonesia memiliki akar yang panjang, seiring dengan sejarah perkembangan Islam di Tanah Air itu sendiri. Berbeda dengan kehadirannya di wilayah lain yang dilakukan melalui penaklukan dan pembebasan bersenjata, Islam di Indonesia serta wilayah lain di sekitarnya datang dan berkembang secara damai dibawa oleh para pedagang Muslim dan pengabar agama (*da'i*) dari kalangan sufi. Karena itu, kepemimpinan Islam yang pertama kali muncul di Indonesia adalah pemimpin tarekat dan pedagang Muslim, bukan pemimpin militer atau pemimpin negara. Dalam perkembangannya kemudian, seiring dengan tumbuhnya Nusantara sebagai pusat perdagangan, muncul dua kesultanan penting, yakni Samudera Pasai dan Malaka, disusul beberapa kerajaan Islam seperti Banten, Demak, Cirebon, Riau, dan beberapa lainnya. Kehadiran beberapa kerajaan Islam ini kemudian membawa khasanah baru yang mengkristal dalam bentuk kepemimpinan pemerintahan atau birokrasi. Kepemimpinan model ini sesungguhnya telah memiliki akar yang kokoh dalam sejarah kerajaan di Tanah Air jauh sebelum Islam menancapkan pengaruhnya, sebagaimana

nampak dari hadirnya beberapa kerajaan Hindu dan Buddha yang cukup monumental seperti Majapahit, Daha, Pajajaran, Sriwijaya, dan lain-lain.

Sebagai agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, Islam memang memiliki lahan yang amat subur bagi tumbuhnya kepemimpinan politik dan birokrasi, karena untuk menegakkan hukum dan membangun kesejahteraan masyarakat dibutuhkan sebuah institusi yang bisa memberikan pelayanan dan menampung seluruh aspirasi rakyat. Institusi itu adalah negara, dengan berbagai corak dan bentuknya. Qur'an dan Hadits sendiri memberikan nilai-nilai umum yang bisa diimplementasikan ke dalam landasan nilai dan etik bagi munculnya sistem pemerintahan dan birokrasi, meski tafsir terhadapnya tidak menghasilkan pemahaman yang tunggal. Sebagaimana bisa dilihat dari literatur keagamaan dan keilmuan Islam, terdapat berbagai teori dan corak pemerintahan Islam yang sama-sama didasarkan atas Qur'an dan Sunnah Nabi. Tetapi, terlepas dari berbagai pemikiran yang beraneka ragam itu, fakta ini membuktikan bahwa pemimpin birokrasi dalam Islam memiliki akar sejarah dan intelektualnya yang amat kuat. Karenanya, meski Indonesia sendiri bukan negara Islam dalam arti mendasarkan asas dan ideologi negaranya pada ajaran Islam, tetapi sebagai sebuah komunitas umat yang hidup dalam sebuah bangsa dan negara, maka kepemimpinan birokrat ini tumbuh juga secara tak terhindarkan.

Secara historis, munculnya ketiga corak kepemimpinan ini juga dilatarbelakangi oleh perjuangan masyarakat merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonialisme. Untuk menggalang kekuatan intelektual, keteguhan spiritual, dan kesatuan fisik menghadapi berbagai kebijakan politik kolonial, masyarakat Indonesia kemudian membangun wadah dan perhimpunan sosial-keagamaan dan politik seperti Syarikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berubah menjadi Syarikat Islam (SI), Jong Islamitein Bond (JIB), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan berbagai organisasi Islam lainnya, di samping organisasi-organisasi sosial politik yang didasarkan atas semangat nasionalisme semisal Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Kedua bentuk organisasi ini kemudian mengkristal ke dalam dua wadah ideologis, yakni Islam dan nasionalisme. Karena perbedaan ideologis mengenai dasar negara yang hendak dimerdekakan itulah, kelompok Nasionalis oleh sebagian pengamat tidak dimasukkan ke dalam jajaran pemimpin Islam. Pengumpulan itu kemudian diperkuat oleh peristiwa "penghapusan tujuh kata" yang terkenal, serta perdebatan berkepanjangan di Konstituante pada 1950-an. Dengan alasan



ini, sebagian pengamat memandang pemimpin Islam sebagai kelompok yang memperjuangkan tegaknya Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan selainnya masuk ke dalam kelompok pemimpin nasionalis. Bahwa hampir semua pemimpin nasionalis itu adalah juga Muslim, bahkan di antara mereka ada yang terkenal saleh, tetap tidak dimasukkan ke dalam kategori pemimpin Muslim. Kurang lebih dalam konteks inilah Geertz membagi kesadaran keagamaan masyarakat Jawa menjadi priyayi, santri, dan abangan.<sup>1</sup>

Karena kuatnya pertentangan ideologis antara Islam dan Nasionalisme (atau antara "santri" dengan "priyayi-abangan"), maka kedua paradigma ini senantiasa berada pada posisi berhadap-hadapan. Tetapi karena kalangan Muslim sendiri kurang memiliki kesiapan intelektual, maka hasil akhir yang bisa dicapai adalah tersingkirnya kekuatan "Islam ideologis" dan menangnya kekuatan "nasionalis-sekuler," meski dengan tingkat kompromi yang tidak selalu mengecewakan. Demikianlah, terlepas dari para pemimpinnya sendiri yang secara individual mayoritas beragama Islam, sejak Proklamasi Kemerdekaan kaum Muslimin di Indonesia hampir selalu dipimpin oleh kelompok Nasionalis ini. Meski demikian, kaum Muslimin sendiri mendapatkan konsesi melalui hadirnya kementerian agama yang antara lain menangani lembaga-lembaga pendidikan keislaman seperti pesantren dan madrasah. Oleh beberapa pengamat, kehadiran Departemen Agama ini cukup signifikan dalam membangun kehidupan beragama dan orientasi keilmuan kaum Muslimin. Melalui kementerian inilah, misalnya, kepentingan keagamaan umat bisa diakomodir, hubungan antar-agama berlangsung secara harmonis, dan kualitas pendidikan Islam dibangun secara sistematis.

Akan tetapi belakangan, Islam *vis a vis* nasionalisme (Pancasila) kemudian lebih diletakkan dalam kerangka politik kenegaraan, bukan pada masalah sosial keagamaan, sebab dari kalangan nasionalis juga terdapat tidak sedikit yang saleh dan taat beragama, sebagaimana ada pula kalangan santri yang menjadi pejabat pemerintah. Perkembangan ini berlangsung seiring dengan terjadinya proses mobilitas vertikal kalangan santri, pembebasan Islam dari stigma politik, serta menyebarnya keahlian dan bidang keilmuan kaum santri akibat hunturnya sikap dualistik kaum Muslimin terhadap ilmu

<sup>1</sup>Tentang kelompok *abangan*, Geertz menyebut indikator afiliasi politik mereka kepada partai-partai berhaluan kiri. Dengan begini jelas bahwa pemimpin Islam, dalam perspektif Geertz adalah pemimpin yang memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara (*santri*); pemimpin nasionalis merupakan kelompok orang yang memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi (*priyayi*). Hemat saya, kategori ini bukan hanya keliru, tetapi sekaligus juga menyesatkan. Sebab, dalam konteks ini, tidak sedikit priyayi yang santri, dan karenanya layak dimasukkan ke dalam kelompok pemimpin Islam.



pengetahuan. Demikianlah, kemudian kelompok menengah Muslim yang sudah termobilisasikan ini tumbuh di berbagai instansi dan organisasi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Pada gilirannya, penyebaran ini menghasilkan polarisasi kepemimpinan Islam secara signifikan.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan birokrasi, melainkan juga menggejala dalam organisasi-organisasi sosial keagamaan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Di organisasi-organisasi itu kini terlibat tidak hanya para ulama, ustadz, dan cendekiawan Muslim; tetapi juga pengusaha, pedagang sukses, para Jenderal purnawira, mantan pejabat, dan komponen lain yang *concern* dengan persoalan keagamaan. Bahkan seorang pengusaha sukses atau mantan pejabat negara ikut menggagas pendirian lembaga pendidikan Islam, di samping menjadi donatur tetap beberapa organisasi dan tempat ibadah.

### Dimensi Sosial Budaya dan Politik Kepemimpinan Islam

Seiring dengan perkembangan budaya dan persentuhan masyarakat Islam dengan berbagai khasanah kultural dan politik lokal, regional, nasional dan global, kepemimpinan Islam di Indonesia mengalami dinamika internalnya secara signifikan. Karena sejarah sosialnya sendiri yang erat terkait dengan budaya feodal, kaum Muslimin di Nusantara semula memandang pemimpin sebagai seorang yang mesti mutlak diikuti dan nyaris tidak bisa salah. Dalam tradisi Pesantren tempat di mana ~~sejarah~~ kepemimpinan tradisional-kharismatik ini masih ditemui, misalnya, seorang kyai memiliki kekuasaan mutlak dalam menentukan kitab apa yang mesti dikaji, pengetahuan keagamaan apa yang bisa (dan tidak bisa) dipelajari, serta sikap sosial seperti apa yang mesti dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pemimpin, seorang kyai hampir-hampir tidak memberikan ruang kepada para santri untuk mengemukakan gagasannya, menawarkan alternatif bagi pengembangan lembaga, apalagi melakukan kritik terhadap masalah keilmuan yang dipelajarinya. Kepemimpinan dalam konteks ini lebih dilihat secara mekanik-individual, karena ketaatan masyarakat tidak disebabkan oleh kemampuan manajerialnya, tetapi lebih disebabkan oleh unsur lain yang sifatnya supranatural. Dalam sejarah, model kepemimpinan individual kharismatik ini tidak hanya muncul di lingkungan Pesantren, melainkan juga dalam organisasi rasional semisal Syarikat Islam. Para anggota Syarikat Islam di berbagai pedesaan Jawa, misalnya, memandang "Ketua Tjokro" (H.O.S.

Cokroaminoto) sebagai Ratu Adil, dan kartu anggota organisasinya diyakini mengandung jimat yang bisa tidak tembus peluru.

Akan tetapi, dalam perkembangannya kemudian, tradisi kepemimpinan ini mengalami perubahan yang cukup penting. Karena persentuhannya yang relatif intensif dengan berbagai informasi dan perkembangan budaya, seorang kyai kini tidak lagi berada "di atas angin" sehingga tidak bisa disentuh. Bila sebelumnya seorang kyai merupakan "penguasa tunggal" Pesantren, kini cukup banyak dari institusi pendidikan tradisional Islam ini yang *memanage* lembaganya secara kolektif dengan melibatkan berbagai komponen Pesantren. Bahkan beberapa Pesantren telah menyertakan figur di luar Pesantren untuk ikut serta menangani perkembangan lembaganya, misalnya dalam bidang ekonomi, pengadaan guru/ustadz, dan penanganan manajemen kelembagaan. Sementara anggota organisasi sosial keagamaan sendiri kini tidak lagi memandang hanya kelompoknya yang benar sambil menuding pihak lain sebagai *bid'ah*, tetapi sudah memulai tradisi dialog yang mengarah pada toleransi internal kaum Muslimin dengan berusaha memahami --meski tidak mengikuti-- pemikiran keagamaan lain.

Fenomena ini berakibat pada lunturnya komunitas pendukung institusi pendidikan keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan yang didasarkan atas pertimbangan genealogi intelektual dan kediaman. Bila pada tahun 70-an masih muncul anggapan yang salah kepada masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya ke suatu lembaga pendidikan yang secara tradisional sudah diikuti sejak lama --misalnya dengan tuduhan *munafik*-- kini anggapan itu sudah hilang. Seorang anggota kelompok organisasi pendidikan dan dakwah kini bisa memasukkan anaknya ke lembaga pendidikan dan organisasi sosial mana pun dengan alasan individual yang lebih rasional. Dengan demikian ikatan organisasi dan sosial keagamaan yang didasarkan atas pertimbangan kharisma individual --apalagi messianistik-- sudah ditinggalkan. Sehingga seorang Cokroaminoto kini lebih dicatat sebagai seorang pahlawan Muslim, dan tidak lagi dipersepsi sebagai Ratu Adil yang membawa misi penyelamatan dengan kekuatan supra-human.

Perkembangan ini antara lain disebabkan karena adanya diversifikasi pendidikan dan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Bahkan, bidang keilmuan Pesantren pun kini tidak lagi spesifik mengkaji kitab kuning *an sich*, tetapi juga mendirikan madrasah dan lembaga pendidikan umum dengan berbagai tingkatannya. Selain itu, kyai sendiri kini tidak lagi murni berlatar



belakang Pesantren tradisional, melainkan memiliki latar belakang pendidikan moderen. Bahkan tidak sedikit dari mereka merupakan lulusan perguruan tinggi Islam (di dalam dan luar negeri), malah ada pula sarjana perguruan tinggi umum.

Bila dunia Pesantren yang terkenal dengan stigma tradisional saja sudah mengalami perubahan pola kepemimpinan, maka apatah lagi lembaga-lembaga lain yang lebih moderen. Perkembangan ini tentunya memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap corak kepemimpinan Islam di Indonesia serta pada semakin luasnya pengakuan sosial terhadapnya. Sehingga seorang kyai tidak sekedar diakui sebagai ulama yang mumpuni dalam bidang keislaman, tetapi juga dimasukkan ke dalam kelompok cendekiawan Muslim yang fasih berbicara tentang berbagai persoalan akademis yang tidak dikenal dalam tradisi keilmuan Pesantren. Demikianlah, kemudian muncul terminologi "ulama-intelekt" sedikitnya dalam duapuluh tahun terakhir.

Dalam perkembangan yang sama, nampak pula arus balik dari kalangan masyarakat berpendidikan sekuler yang mempelajari agama secara serius, atau menjadi seorang pengkhotbah yang secara intensif memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat. Fenomena ini sebetulnya sudah muncul pada dekade 20-an dengan tokohnya semisal Cokroaminoto, Hadji Agus Salim, Mohammad Natsir, dan Mohammad Roem. Tetapi belakangan gejala ini nampak semakin menguat seiring dengan tumbuhnya kesadaran keagamaan di kalangan kelas menengah Muslim di Indonesia. Dari gejala ini kemudian muncul terminologi kebalikannya, yakni "intelektual-ulama". Dari latar belakang pendidikan dan disiplin keilmuannya ia jelas seorang intelektual; tetapi karena penguasaannya terhadap masalah-masalah keagamaan dan komitmennya terhadap Islam dan kaum Muslimin ia juga masuk ke dalam kategori ulama. Tumbuhnya komunitas Muslim ini antara lain juga berkat pendadaran intensif dan sistematis yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pelajar dan kemahasiswaan seperti Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Di tengah iklim politik yang tidak kondusif pada masa Orde Baru, kekuatan kelompok menengah Muslim ini secara kreatif membangun strategi baru kehidupan beragama dengan mengedepankan pendekatan kultural. Dengan mengakomodir berbagai kebijakan pemerintah tanpa *counter* politik-ideologis, para pemikir dan budayawan Muslim melakukan "penyusupan nilai" ke dalam birokrasi pemerintahan, lembaga-lembaga kebudayaan,

institusi ekonomi, dan kalangan kampus. Di sini, kebijakan depolitisasi Islam selama puluhan tahun kemudian disiasati secara cerdas melalui usaha substansiasi nilai keagamaan melalui pengenalan wacana keislaman yang lebih transformatif, kontekstual, toleran, dan inklusif. Pendekatan ini secara signifikan menghasilkan kehidupan keagamaan yang lebih semarak dan akademis di seluruh lini, termasuk birokrasi. Hasilnya bisa dilihat dari semaraknya kampus dengan kehidupan keagamaan, adanya salat Jum'at dan masjid atau musala di kantor-kantor pemerintah dan perusahaan swasta, diselenggarakannya pengajian di kalangan artis dan pekerja budaya, bertebarnya penerbitan buku-buku agama dengan jumlah dan kualitas keilmuan yang lebih meningkat, tingginya minat untuk melaksanakan ibadah haji sampai menyebabkan daftar tunggu (*waiting list*) yang panjang, serta menyebarnya pemakai busana Muslim(ah) ke berbagai lapisan sosial.

Fenomena ini secara optimis bisa dilihat sebagai langkah strategis kaum Muslimin di Indonesia dalam menyongsong abad baru yang rasional dan moderen dengan berpijak pada nilai-nilai etik dan universalitas agama bagi terwujudnya masyarakat madani yang demokratis, inklusif, dan rasional. Sekali lagi, tumbuhnya gairah keagamaan yang lebih akademis dan toleran ini dimungkinkan oleh munculnya kelompok cendekiawan muda yang lebih menguasai berbagai disiplin keilmuan, serta terbukanya cakrawala pemikiran mereka terhadap setiap diskursus akademik. Hal ini diimbangi oleh meningkatnya pendidikan masyarakat, lunturnya dualisme keilmuan akibat dibangunnya kebijakan baru terhadap lembaga pendidikan Islam, dan semakin luasnya akses informasi budaya dan keilmuan melalui berbagai media.

Dalam pada itu, fenomena keagamaan ini juga patut mempertimbangkan usaha revitalisasi pesantren, majelis taklim, lembaga-lembaga dakwah, dan institusi pendidikan keagamaan (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, IAIN dan STAIN) yang dilakukan Departemen Agama beserta seluruh komponen masyarakat. Dengan jumlah yang cukup besar serta menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah dan wilayah, lembaga pendidikan keagamaan ini memiliki pengaruh yang tidak kecil terhadap fenomena keilmuan dan orientasi keagamaan kaum Muslimin di Indonesia. Sehingga, tanpa mengabaikan lembaga pendidikan lain serta berbagai institusi sosial keagamaan lainnya, secara kategoris bisa dikatakan bahwa membicarakan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan ini untuk sebagian bisa berarti membicarakan masa



depan umat Islam di Indonesia. Antara lain karena pertimbangan ini Departemen Agama bersama-sama organisasi pendidikan dan dakwah secara terus-menerus memperbaiki kualitas lembaga pendidikan keagamaan dengan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan perpustakaan, menyempurnakan kurikulum, meningkatkan kualitas sumberdaya pengajar dan pengelola pendidikan, serta menata kembali sistem pengelolaan dan manajemen madrasah serta lembaga pendidikan Islam lainnya.

Usaha ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai harapan dan tantangan umat di masa mendatang, seperti arus modernisasi, tantangan industrialisasi, perkembangan sains dan teknologi, perkembangan metodologi keilmuan, kebutuhan keagamaan masyarakat masa depan, dan gencarnya arus budaya global yang masuk ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Tentu saja usaha ini juga dilakukan dengan tetap mempertimbangkan khasanah budaya lokal, antara lain untuk kepentingan spesifikasi keilmuan dan keterampilan siswa.

Tentunya usaha ini akan berpengaruh pada corak dan model kepemimpinan Islam di Indonesia pada masa-masa mendatang. Dengan kurikulum pendidikan yang menghapus dualisme keilmuan, para siswa akan memiliki wawasan yang lebih luas, tidak sekedar pada penguasaan ilmu-ilmu agama dalam pengertian yang sempit. Dengan manajemen moderen, lembaga pendidikan keagamaan tidak lagi tergantung pada figur pemimpin kharismatik, sehingga bisa mendongkrak tumbuhnya kepemimpinan yang lebih demokratis, rasional, dan sistematis. Dengan sarana dan prasarana pendidikan yang lebih memadai, para siswa bisa mengekspresikan potensinya secara optimal, sehingga bisa meningkatkan kualitas *out put* yang dihasilkan. Dengan sarana perpustakaan yang representatif, para siswa tidak lagi memiliki ketergantungan yang penuh kepada para pendidik, melainkan bisa mengetahui lebih banyak informasi keilmuan melalui buku-buku yang tersedia. Dengan penguasaan dan spesifikasi keilmuan guru, diharapkan bisa terbangun suasana pembelajaran yang lebih dialogis, demokratis, dan akademis. Dengan penguasaan keterampilan yang lebih spesifik, para lulusan madrasah diharapkan tidak lagi mengalami kesulitan kerja setelah ia berada di tengah-tengah masyarakat. Sementara dengan memasukkan bidang studi umum, para lulusan madrasah mampu menembus berbagai perguruan tinggi (baik umum maupun agama) sesuai dengan minat keilmuannya masing-masing.

Untuk sebagian, ini tentunya masih merupakan harapan. Tetapi, dengan melihat fenomena diterimanya para lulusan madrasah ke perguruan tinggi umum favorit dalam limabelas tahun terakhir, harapan ini tampaknya bukan sekedar isapan jempol. Hasil akhir yang diharapkan dari sini adalah munculnya para pemimpin Muslim yang mampu menjawab tantangan global dengan tetap mengacu pada nilai-nilai etik Islam.

Pada sisi lain, harapan ini juga bisa ditumpukan pada para siswa dan mahasiswa yang melakukan studi di sekolah dan perguruan tinggi umum. Maraknya suasana keagamaan di kampus-kampus untuk sebagian bisa dipandang sebagai "tabungan" bagi tumbuhnya para sarjana yang peduli dengan persoalan-persoalan keagamaan di masa depan. Di kemudian hari, kehadirannya tentu saja ikut mewarnai kehidupan sosial keagamaan serta corak kepemimpinan Islam di Indonesia. Dalam konteks ini, maka bergantinya Orde Baru dan munculnya Orde Reformasi, setidaknya untuk sebagian, ikut juga "digarami" oleh para pelajar Muslim yang peduli terhadap masa depan agama dan bangsa ini.

### Arah Baru Kepemimpinan Islam di Indonesia

Berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang diindikasikan oleh lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998 telah memberi ruang baru bagi umat Islam untuk mengekspresikan hak-hak politiknya secara bebas dan terbuka. Fenomena ini antara lain nampak dari munculnya berbagai partai politik berdasarkan agama, di samping partai lain yang berasas Pancasila, demokrasi religius, dan lain-lain kecuali komunisme. Indikator ini oleh sebagian dipandang sebagai kembali munculnya politik aliran di mana masing-masing kekuatan politik merepresentasikan akar budaya dan latar sosial-keagamaannya. Selain itu, gejala ini juga oleh sebagian dibaca sebagai hadirnya kembali ideologisasi agama (Islam) seperti yang sempat muncul pada tahun 50-an.

Sebagai buah perjuangan reformasi yang antara lain melahirkan *ephoria* politik, kemunculan partai-partai agama itu bisa dimaklumi dan perlu disyukuri. Dari satu sisi fenomena ini bisa dilihat secara optimistik sebagai tingginya kesadaran politik kaum Muslimin seiring dengan meningkatnya kehidupan ekonomi dan wawasan keilmuan. Dengan kesadaran politik yang tinggi, umat Islam Indonesia diharapkan mampu lebih gigih dan giat lagi membaca dan membawa aspirasi politik umat ke tingkat yang lebih tinggi



dengan menawarkan berbagai kebijakan dan langkah-langkah kongkrit yang bisa mengangkat harkat dan martabat umat.

Dari sisi yang lain, hal ini bisa menumbuhkan iklim yang sehat bagi setiap orang untuk melakukan promosi dan mendapat pengakuan massa secara lebih luas lagi. Sampai sejauh ini, peta keagamaan di Indonesia seringkali disederhanakan ke dalam tiga kategori umum, yakni tradisional (yang mempertahankan tradisi keislaman lokal dan mempedomani sumber-sumber klasik secara tidak kritis), puritan (memahami ajaran agama secara tekstual dan melaksanakannya secara ketat), dan moderen (menterjemahkan pesan keagamaan secara rasional dengan membuka luas kreasi berpikir). Masing-masing kategori ini diisi oleh organisasi sosial keagamaan dengan anggota dan institusi pendidikan sendiri-sendiri. Bahkan, dalam hal-hal tertentu, organisasi ini juga berkembang di daerah-daerah tertentu dengan komunitas pendukung yang tertentu pula. Peta ini tentunya akan mengalami perubahan drastis manakala tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya ikut aktif dalam organisasi politik. Sebab, dengan logika meraup suara sebanyak-banyaknya, masing-masing orang akan berusaha menarik simpati kelompok yang berada di luar organisasi sosial keagamaannya. Dengan demikian, maka penajaman arus politik keagamaan ini akan dibarengi dengan terbukanya katup-katup kultural dan keagamaan yang selama ini membelenggu masing-masing organisasi. Demikianlah, suatu organisasi sosial politik yang didirikan oleh seorang tokoh modernis tidak secara otomatis hanya akan didukung oleh masyarakat yang berada dalam kelompoknya, tetapi tidak menutup kemungkinan mendapat dukungan dari kalangan organisasi lain bila yang bersangkutan dipercaya mampu memperjuangkan dan melaksanakan aspirasinya.

Terlepas dari proposisi di atas, fenomena politik yang berkembang pada satu tahun terakhir ini merupakan buah dari tingginya kesadaran politik massa, baik karena meningkatnya pendidikan, munculnya ketimpangan ekonomi akibat krisis moneter yang berkepanjangan, tumbuhnya kebebasan masyarakat untuk mengekspresikan hak dan wewenangnya, serta adanya ketidakpuasan terhadap ketidakadilan ekonomi dan munculnya jurang sosial yang semakin lebar antara mereka yang berpunya dengan sebagian terbesar masyarakat yang miskin. Dengan berbagai sebab itu bisa dimaklumi bila tuntutan reformasi merupakan aspirasi yang tidak mungkin bisa dibendung dan dihalangi bahkan oleh penguasa yang paling otoriter sekalipun.

Dalam pada itu, tingginya kesadaran sosial dan kultural umat seiring dengan meningkatnya pendidikan akan mengarahkan mereka pada usaha kontekstualisasi nilai-nilai agama di tengah dunia yang kian mengglobal. Sehingga tuntutan reformasi yang menumbangkan pemerintahan Orde Baru harus dibaca sebagai usaha untuk membangun tataan baru yang demokratis dengan mengacu pada tiga cita-cita keagamaan yang paling sublim, yakni liberasi, humanisasi, dan transendensi. Dengan liberasi diharapkan agar masyarakat terbebaskan dari berbagai bentuk ancaman sosial, politik, ekonomi dan lain-lain, sehingga setiap komponen umat bisa hidup tenang dan berdampingan dengan komponen lain di sekitarnya. Dengan humanisasi diharapkan agar setiap manusia dipandang dan diperlakukan secara manusiawi, sehingga seluruh ekspresi sosial dan intelektualnya bisa berkembang secara penuh. Sementara dengan cita-cita transendensi diharapkan agar setiap manusia secara konsisten bisa melakukan dan sekaligus memperjuangkan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aspek kehidupan.

Cita-cita sosial keagamaan seperti ini tentunya sulit berkembang dalam iklim politik yang otoriter dan tidak demokratis. Karena itu, harapan sosial ini harus juga dibaca sebagai tumbuhnya kecenderungan kepemimpinan Islam yang lebih demokratis, rasional, dan lepas dari belenggu tradisi dan ikatan lokal-primordial yang bisa membelenggu kreativitas.

Kecenderungan ke arah terbentuknya tipe kepemimpinan yang lebih demokratis dan nonsektarian ini bisa dilihat dari kehidupan sosial keagamaan saat ini. Kini seorang pemimpin Muslim tidak lagi terbatas pada aktifis organisasi keagamaan atau institusi keislaman tertentu. Kaum Muslimin di Indonesia kini sudah mulai menerima dan mengakui peran para tokoh agama dari kalangan kampus, lembaga sosial kemasyarakatan (LSM), bahkan memiliki harapan yang cukup besar bagi kemungkinan terlibatnya secara intens para pejabat pemerintah dan pengusaha terhadap perkembangan lembaga-lembaga sosial, pendidikan, dan ekonomi umat. Ini nampak dari adanya fenomena diterimanya seorang bukan-ulama menjadi pemimpin pada beberapa organisasi sosial keagamaan di Indonesia. Bahkan, beberapa cendekiawan kampus dengan keahlian yang bermacam-macam (dokter, ahli kimia, budayawan, dll.) serta pengusaha Muslim kini bisa masuk ke dalam struktur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Fenomena lain yang mungkin lebih signifikan dari munculnya arah baru kepemimpinan Islam di Indonesia adalah dibentuknya organisasi



condeliawan Muslim (ICMI). Di dalam organisasi ini tidak hanya duduk para ulama dan pemikir Muslim dengan berbagai bidang keilmuannya masing-masing, melainkan juga terdapat para pengusaha dan pejabat pemerintah. Terlepas dari usaha kooptasi terselubung pemerintah Orde Baru terhadap organisasi ini serta adanya kecenderungan para anggotanya untuk mengalihkan orientasinya pada kegiatan politik praktis sebagaimana disinyalir banyak pengamat, keterlibatan berbagai komponen keilmuan ke dalam organisasi ini bisa dipandang sebagai suatu fenomena baru dari dimungkinkannya setiap Muslim, terlepas dari profesinya masing-masing, untuk menjadi pemimpin Islam. Sehingga, seorang pemimpin Islam di masa mendatang tidak berasal hanya dari pemerintahan, dari organisasi sosial keagamaan, atau dari lembaga-lembaga tradisional, tetapi bisa dari mana pun, termasuk pengusaha, sejauh yang bersangkutan dipandang kapabel untuk itu.

### Catatan Akhir

Uraian di atas tentu saja tidak memotret secara utuh tentang masa depan kepemimpinan Islam di Indonesia. Tetapi paling tidak, bisa memberikan gambaran umum mengenai arah yang mungkin ditempuh di masa mendatang. Apakah kemungkinan dan prediksi ini bisa terbukti, sepenuhnya sejarah yang akan membuktikan. Salah satu persoalan yang masih perlu diperhatikan bagi kemungkinan tersimpangkannya kecenderungan ini adalah fenomena politik dan ekonomi di Indonesia pada satu tahun terakhir.

Sebagai salah seorang yang ikut terlibat di dalamnya, tentu saja saya berharap agar situasi politik dan ekonomi di Indonesia bisa secepatnya kembali normal, dengan mengacu pada aspirasi gerakan reformasi yang diperjuangkan para mahasiswa dan seluruh komponen bangsa. Sebab, berlarut-larutnya persoalan politik dan ekonomi ini secara keseluruhan akan berpengaruh pada masa depan kaum Muslimin di Indonesia, sehingga seluruh kemungkinan yang paling pahit sekalipun bisa terjadi. Untuk itu, sumbangan pemikiran yang sifatnya konstruktif bagi tumbuhnya Indonesia baru yang lebih baik dari para pemikir Muslim di negara-negara tetangga akan kami terima secara terbuka. *Wallahu a'lam bi al-shawab.* []